

Hegemoni Amerika Serikat dalam Pengelolaan Tambang di Indonesia: Analisis Tambang Freeport-McMoRan di Papua

Alvita Buyung^{a,1}, Jennifer Kantohe^{b,2}, Angelica Rawis^{c,3}

^{a,b,c} Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

e-mail: buyungalvita@gmail.com¹, jennifertthesalonicakantohe@gmail.com², Angelicaelsadairawis@gmail.com³

Correspondence author : buyungalvita@gmail.com

Keywords: ABSTRACT

United States Hegemony; Mining Politics; Freeport- McMoRan; Papua; Structural Dependency	This study examines the political hegemony of the United States in the management of mining resources in Indonesia, with a focus on the exploitation of the Freeport-McMoRan mine in Papua since 1967. Utilizing Antonio Gramsci's theory of hegemony as well as dependency theory from Prebisch, Cardoso, and Faletto, this study explains how American dominance is formed through relations of political, economic, and ideological power within the structure of global capitalism. The method employed is qualitative interpretative research with a literature study approach, using secondary sources in the form of books, scholarly journals, articles, and official documents. Thematic analysis is applied to identify patterns of American hegemony in Indonesia's mining sector. The results of the study indicate that this hegemony emerges through three dimensions. First, the political dimension, which is evident in diplomatic lobbying and policy pressure to maintain Freeport's contracts. Second, the economic dimension, which positions Indonesia as a peripheral country and a supplier of raw materials within the global production chain. Third, the ideological dimension, manifested through development narratives, CSR programs, and the legitimization of discourses that support the continuity of Freeport's operations. In conclusion, the exploitation of the Freeport mine reflects a systemic and multilayered form of American hegemony that reinforces Indonesia's structural dependence. Therefore, strengthening national regulations, diversifying international partners, and achieving technological self-reliance are necessary to enhance sovereignty over natural resource management.
---	---

1. PENDAHULUAN

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tambang memiliki potensi besar dalam menopang kemandirian nasional melalui pemanfaatan emas, tembaga, nikel, batu bara, dan bauksit. Secara normatif, Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak untuk menguasai kekayaan alam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan, kerinduan, dan kesejahteraan masyarakat lokal harus menjadi dasar pengelolaan tambang. Selain itu, untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat meningkatkan nilai nasional melalui industrialisasi dan pengolahan, kebijakan nasional seperti Undang-Undang Minerba (ESDM, 2023). Pemerintah mengatakan bahwa sektor pertambangan harus mendorong transformasi ekonomi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia (ESDM, 2023). Oleh karena itu, konsesi tambang dapat menjadi alat strategi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada modal asing.

Namun, secara empiris, persyaratan normatif tersebut sering kali tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Contoh yang paling jelas adalah kasus PT Freeport-McMoRan di Papua. Perusahaan Amerika

ini mengelola salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia sejak 1967. Di satu sisi, Freeport memainkan peran yang signifikan dalam peningkatan penerimaan negara. Namun, masyarakat Papua sebagai pemilik tanah adat masih menerima manfaat yang sangat terbatas, dan struktur pembagian keuntungan tetap timpang karena sebagian besar keuntungan mengalir ke perusahaan induk di Amerika Serikat.

Kondisi sosial masyarakat Amungme dan Kamoro yang tinggal di sekitar tambang memperjelas ketimpangan ini. Meskipun wilayah tersebut menghasilkan miliaran dolar setiap tahun, mereka masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kerusakan ekologi seperti polusi Sungai Ajkwa, sedimentasi, dan kerusakan wilayah hutan adalah masalah besar yang berdampak langsung pada sumber kehidupan masyarakat lokal. Fenomena ini mencerminkan apa yang sering disebut sebagai malapetaka sumber daya, yaitu ketika kekayaan alam menyebabkan kerentanan sosial, ketergantungan ekonomi, dan ketidakadilan struktural. Selain itu, hubungan antara Freeport dan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi politik global yang sedang berlangsung. Freeport masuk pada awal Orde Baru menjadi bagian dari politik global setelah tahun 1965. Menurut Winters (1996), modal asing digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan ekonomi Indonesia dan mempertahankannya dalam orbit kapitalisme global (Winters, 1996). Sementara Robinson (2018) menyatakan bahwa dukungan AS terhadap rezim Soeharto adalah strategi geopolitik untuk menghentikan ideologi kiri dan mempertahankan kepentingan ekonomi negara-negara Barat di Asia Tenggara (Robinson, 2018).

Dalam situasi seperti ini, Freeport berperan bukan hanya sebagai aktor ekonomi tetapi juga sebagai representasi hegemoni politik AS di Indonesia. Teori bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada investasi asing yang dibangun oleh hegemoni melalui kontrol ekonomi, dukungan politik, dan konstruksi ideologis. Pola ini menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada negara-negara maju dalam hal modal dan teknologi (Winters, 1996 ; Robinson, 2018). Pengelolaan sumber daya alam Indonesia masih berada di antara kekayaan negara dan kepentingan asing, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan antara kondisi normatif dan empiris. Seringkali, sektor pertambangan berfungsi sebagai jalan dominasi asing daripada berfungsi sebagai alat untuk menuju membangun kemandirian nasional. Situasi ini menjadi semakin kompleks karena peran elit di dalam negeri yang terus mempertahankan sistem kemandirian melalui kebijakan yang menguntungkan modal asing (Winters, 1996).

Kasus Freeport menunjukkan bahwa hegemoni tidak hanya ekonomi tetapi juga ideologi. Perusahaan membangun citra sebagai aktor yang membawa manfaat bagi Papua melalui program CSR dan narasi pembangunan, yang diulang oleh pemerintah dan media nasional, menciptakan legitimasi sosial untuk operasi perusahaan meskipun dampak ekonomi dan lingkungannya terus terjadi (Martinez-Alier, J, 2001). Menurut Gramsci (1971), situasi ini merupakan cara untuk membangun persetujuan, atau penerimaan sosial terhadap dominasi, karena masyarakat percaya bahwa struktur tersebut adalah rasional dan menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hegemoni politik Amerika Serikat berfungsi dalam sektor pertambangan Indonesia, khususnya melalui studi kasus Freeport di Papua. Teori hegemoni Antonio Gramsci memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana dominasi terjadi melalui konteks dan legitimasi ideologi, bukan hanya melalui paksaan (Gramsci, 1971).

Selain itu, penjelasan tentang posisi Indonesia sebagai negara periferi dalam sistem kapitalisme global dibantu oleh teori ketergantungan yang dikembangkan oleh Prebisch, Cardoso, dan Faletto (Prebisch, 1950; Cardoso & Faletto, 1979). Jadi artikel ini berusaha menjelaskan dominasi Amerika dalam sektor tambang Indonesia melalui proses struktural yang mencakup aspek ideologi, ekonomi, dan politik. Penelitian ini sangat penting untuk memahami analisis ini karena hubungan antara Indonesia dan Freeport bukanlah sekedar kerja sama ekonomi, namun hubungan hegemonik yang membatasi kemampuan Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya secara adil dan mandiri.

2. TEORI HEGEMONI

2.1 Konsep Dasar Hegemoni

Antonio Gramsci mendefinisikan konsep hegemoni sebagai kepemimpinan moral dan intelektual yang menghasilkan persetujuan sosial (consent) dari kelompok yang didominasi daripada hanya paksaan (Gramsci, 1971). Berbeda dengan Marxisme klasik, yang tekanan dominasi kelas berdasarkan struktur ekonomi, Gramsci tekanan bahwa hubungan antara superstruktur dan basis ekonomi saling mempengaruhi dan dialektis. Hegemoni bekerja melalui dua arena utama, masyarakat politik dan masyarakat sipil, dalam kerangka ini. Masyarakat politik terdiri dari negara, aparat hukum, dan lembaga koersif yang memiliki kekuasaan formal. Namun, masyarakat sipil terdiri dari pendidikan, media, agama, dan komunitas budaya, yang berkontribusi pada pembentukan kesadaran sosial dan pembentukan kesepakatan terhadap tatanan yang dominan (Bocock, 2007). Karena nilai-nilai kelas dominan telah diinternalisasi sebagai kebenaran umum dalam sistem hegemoni, kelompok bawahan tidak langsung berpikir.

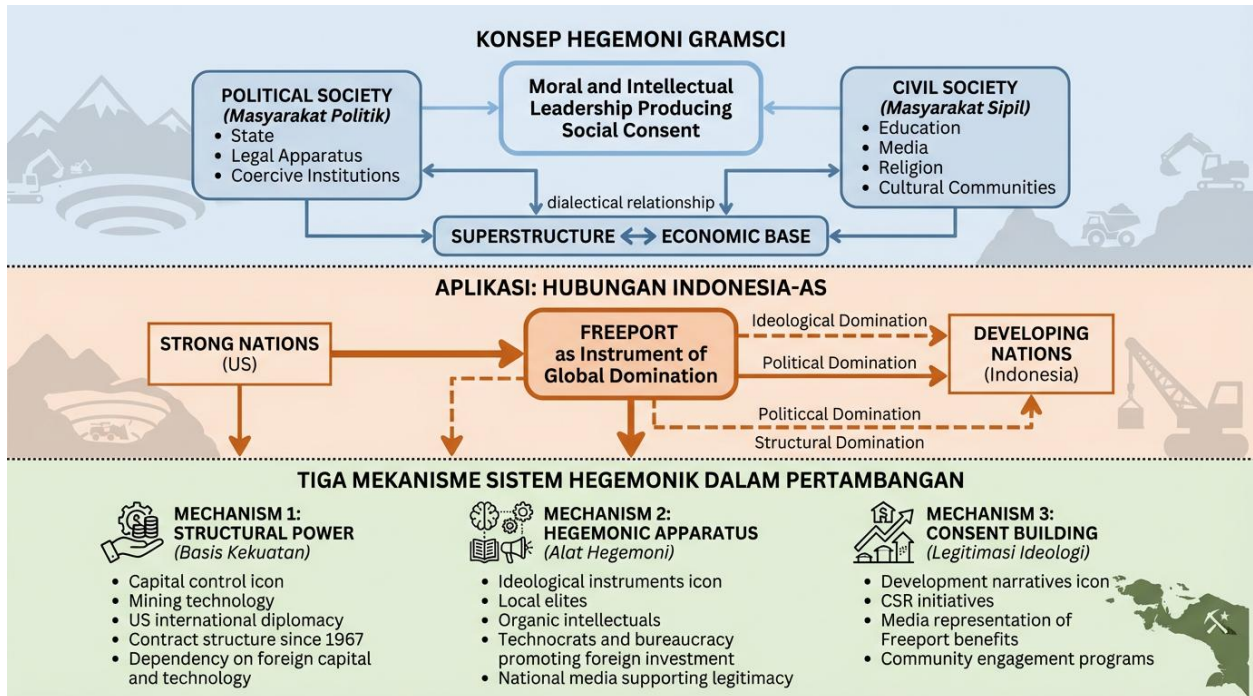
Oleh karena itu, hegemoni adalah kombinasi antara kekuasaan dan kepemimpinan moral, yang memungkinkan orang untuk menerima kekuasaan secara sukarela dari pada dipaksakan. Analisis yang lebih mendalam terhadap praktik kekuasaan kontemporer, termasuk hubungan antara negara kuat dan negara berkembang dalam struktur kapitalisme global, dapat dilakukan melalui struktur ini. Untuk memahami hubungan kekuasaan dalam industri pertambangan Indonesia, khususnya dalam hal operasi Freeport-McMoRan di Papua, teori hegemoni Gramsci dapat diterapkan. Relasi antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan relasi hegemonik yang mencakup dominasi ideologi, politik, dan struktural (Winters, 1996). Freeport menjadi alat untuk menunjukkan bagaimana dominasi global menggunakan institusi negara, elit politik, dan wacana pembangunan. Relasi ini, menurut pemahaman Gramscian, menunjukkan bagaimana kekuatan internasional membentuk struktur domestik negara berkembang melalui pengaruh ekonomi dan konteks ideologis (Cox, 1983).

Dunia pertambangan telah merawat sistem yang hegemonik dengan tiga cara. Pertama, membangun basis kekuatan (*structural power*). Freeport telah mempertahankan posisinya sejak tahun 1967 berkat kontrol modal, teknologi tambang, dan diplomasi internasional Amerika Serikat. Sejak era Orde Baru, struktur kontrak kerja dirancang untuk memberikan kepentingan yang signifikan kepada perusahaan asing (Winters, 1996). Indonesia adalah negara berkembang yang bergantung pada modal dan teknologi asing, yang membuatnya tidak memiliki tawaran posisi yang baik dalam renegotiasi kontrak (Prebisch, 1950). Menurut Gramsci, situasi ini merupakan jenis dominasi dalam masyarakat politik di mana kekuatan global yang lebih besar mempengaruhi kebijakan negara.

Kedua, membangun alat hegemoni (*hegemonic apparatus*). Salah satu alat hegemoni yaitu instrumen ideologi dan elite lokal. Dengan adanya instrumen ideologis dan peran elit lokal sebagai "intelektual organik" yang mencari legitimasi dapat menjadi alat kepentingan modal asing mendukung dominasi struktural (Gramsci, 1971). Kebijakan investasi asing dipromosikan oleh para teknokrat, birokrasi, dan mencerminkan Indonesia sejak Orde Baru. Kebijakan seperti UU PMA 1967 dan peraturan investasi lainnya telah menjadi kebijakan dominan yang menganggap modernisasi keterbukaan ekonomi sebagai hal yang perlu (Patria & Arief, 2009). Media nasional juga membantu meningkatkan persepsi investasi asing dan memperkuat legitimasi publik terhadap sistem ekonomi yang menguntungkan kepentingan internasional.

Ketiga, mendapatkan legitimasi ideologi (*consent building*). Ideologi legitimasi dibangun melalui cerita pembangunan, inisiatif CSR, dan media perwakilan mengenai keuntungan Freeport bagi Papua. Menurut WALHI (2018), strategi ini menggambarkan dominasi asing sebagai kerja sama yang menguntungkan. Ini adalah cara untuk membangun persetujuan, menurut Gramsci, di mana kelompok yang terdampak menerima eksploitasi struktur sebagai sesuatu yang wajar karena disebabkan oleh pembangunan, kemajuan teknologi, dan modernisasi (Gramsci, 1971). Untuk menggambarkan hubungan antara dimensi ideologi, politik, dan ekonomi yang saling memperkuat untuk menjelaskan bagaimana hegemoni Amerika Serikat bekerja dalam sektor pertambangan Indonesia, khususnya melalui operasi Freeport-McMoRan di Papua. Swerta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kekuasaan

hegemonik, yang didasarkan pada paksaan dan persetujuan sosial, berfungsi melalui peran elit lokal, kelembagaan nasional, dan pembentukan narasi pembangunan. Dengan skema ini, pembaca diharapkan dapat memahami struktur dominasi Amerika Serikat dalam praktik pertambangan Indonesia pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Peta Konsep Hegemoni Pengelolaan Tambang di Indonesia

Sumber: Diolah Penulis dalam Berbagai Sumber

2.2. Kontra Hegemoni dan Masyarakat Sipil Indonesia

Upaya untuk meningkatkan kesadaran kritis dalam upaya melawan ideologi dominan yang dikenal sebagai kontra-hegemoni. Menurut Gramsci (1971), hegemoni tidak selalu absolut; ide tandingan selalu muncul dalam masyarakat sipil. Kritik terhadap ketidakadilan sosial, ketergantungan ekonomi, dan kerusakan lingkungan Papua menimbulkan kontra-hegemoni dalam konteks Indonesia. Ada beberapa cara membangun kontra hegemoni dalam dunia tambang. *Pertama*, masyarakat sipil sebagai ruang perlawanan ideologis. Cara ini berupa advokasi, laporan kritis, dan penguatan identitas lokal, LSM, masyarakat adat, dan ilmuwan membentuk dasar kontra-hegemoni. *Kedua*, membangun wacana kedaulatan ekonomi nasional. Cara kedua ini dapat melakukan kebijakan hilirisasi, nasionalisasi saham Freeport, dan penguatan undang-undang nasional adalah contoh lain dari kontra-hegemoni (ESDM, 2023). Kebijakan ini tidak hanya tindakan ekonomi; mereka adalah ideologi strategis yang bertujuan untuk membangun hegemoni baru yang didasarkan pada kepentingan nasional (Cox, 1983). Kendati demikian, dalam membangun kontra hegemoni tidak bebas dari masalah seperti dominasi arus media utama, ketergantungan teknologi, kooptasi elit politik, dan fragmentasi gerakan sosial (Fakih, 1996). Oleh karena itu, melawan hegemoni global membutuhkan ikatan ideologi yang berkelanjutan melalui pendidikan politik, peningkatan komunitas lokal, dan independensi media.

3. METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis praktik hegemoni AS dalam pengelolaan tambang Freeport-McMoRan di Papua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, hubungan kekuasaan, dan konteks sosial-politik yang tidak dapat dijelaskan dengan angka atau pengukuran (Creswell, 2016). Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam

tentang ketergantungan struktur, dinamika kekuasaan, dan wacana yang membingkai hubungan antara Indonesia dan aktor pertambangan asing. Penelitian ini menggunakan studi literatur, atau studi literatur. Semua data yang dikumpulkan berasal dari literatur sekunder, yaitu buku teori politik internasional, jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi pemerintah, publikasi media berani, dan dokumen organisasi masyarakat sipil. Karya Gramsci tentang hegemoni (Gramsci, 1971), teori ketergantungan Prebisch (1950) dan Cardoso & Faccini tentang hegemoni (Faccini, 1997). Data kontekstual tentang Freeport, di sisi lain, berasal dari laporan resmi Kementerian ESDM (ESDM, 2023), laporan lembaga independen seperti WALHI (2018) dan Amnesty International (2021), dan pemberitaan media.

Penelitian ini menganalisis data dengan analisis tematik digunakan. Metode ini memungkinkan para peneliti menemukan pola dan kategori utama yang muncul dalam berbagai dokumen, yang mencakup aspek ideologi, politik, dan ekonomi yang membentuk hegemoni Amerika dalam industri pertambangan. Dalam kerangka teoritis Gramsci, analisis tematik juga berguna untuk menjelaskan hubungan antar konsep. Hal ini terutama berlaku untuk dominasi, persetujuan, dan aktor peran negara dan masyarakat sipil dalam mereproduksi atau menolak hegemoni (Patria & Arief, 2009). Hasil empiris dapat dihubungkan dengan kerangka teori dengan menggunakan teknik analisis ini. Misalnya, sebagaimana dijelaskan oleh Prebisch (1950), ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi asing dikaitkan dengan struktur ekonomi global, sedangkan legitimasi sosial terhadap kehadiran Freeport dipahami melalui konsep *consent building* yang ada dalam hegemoni Gramsci (Gramsci, 1971). Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini tidak hanya menjelaskan fenomena tetapi juga menafsirkan cara struktur kekuasaan global berfungsi di Indonesia. Secara keseluruhan, metode kualitatif yang dikombinasikan dengan studi literatur menawarkan kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami bagaimana hubungan di bidang pertambangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dibentuk oleh teori hegemoni, data empiris, dan struktur politik-ekonomi. Metode ini memastikan analisis penelitian bersifat mendalam, kritis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. TEMUAN DAN ANALISIS

4.1. Temuan Penelitian

Para *scholar* telah menghubungkan mekanisme empiris dengan literatur hegemonik, mengklasifikasikan instrumen politik, ekonomi, hukum, dan ideologis serta menunjukkan bagaimana instrumen tersebut beroperasi dalam pengelolaan tambang Freeport di Papua. Dominasi Amerika dalam pengelolaan tambang diidentifikasi berupa berbagai mekanisme yang saling tumpang tindih dimana kekuatan korporasi Amerika membentuk hasil dengan lobi diplomatik dan hubungan keamanan, kontrol atas aliran modal dan keuntungan, perlindungan kontraktual dan investasi; dan pembungkaman diskursif pembangunan dan modernisasi. Leith (2002) dan Nugroho (2013) berperan penting dalam analisis mekanisme politik dan koersif, sementara Zada dkk (2021) dan Martinez-Alier (2001) membahas instrumen hukum dan ideologis. Temuan dari *scholar* ini menjadi bagian sangat penting dari temuan penelitian, untuk lebih jelas perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hegemonik Amerika Serikat dalam Eksplorasi Tambang di Papua

Tipe Mekanisme	Praktik dan Operasi di Papua	Bukti Representatif
Politik-Diplomatik	Lobi korporat AS dan keselarasan dengan Suharto memungkinkan perlindungan dan jendela kebijakan yang menguntungkan	Leith mendokumentasikan ikatan politik Freeport dan pengaturan protektif untuk konsesi
Ekonomi-Kontrol Modal	Konsentrasi investasi, signifikansi pajak, dan ekstraksi rente menghasilkan	Astuti membaca hubungan melalui lensa dependensi/Marxis mencatat ketergantungan

Hukum-Perlindungan Konsensi	ketergantungan struktural <i>Contract of Work</i> dan jaminan investasi mengisolasi klaim korporat, renegotiasi kemudian menggeser kepemilikan formal tetapi mempertahankan perlindungan investor	ekonomi berkelanjutan Zada et al. menganalisis renegotiasi dan akuisisi 51% pemerintah sebagai langkah kedaulatan dalam bentuk lisensi baru
Ideologi dan Budaya	Narasi pembangunan, CSR, dan valuasi teknis menggantikan klaim adat dan menormalkan ekstraksi.	Martinez-Alier berargumen bahwa bahasa valuasi menentukan kerusakan mana yang dapat dibaca dalam sengketa

Sumber: Martinez-Alier, J. (2001); Leith (2002); Nugroho (2013); Zada et al., (2021); Astuti, A. A. (2023).

4.2. Penjelasan Hegemoni Amerika Serikat Bukti Representatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara investor asing dan negara penerima modal serta struktur kekuasaan yang menggabungkan kekuatan politik, ekonomi, dan filosofi menunjukkan hegemoni AS dalam industri pertambangan Indonesia. Dalam hal ini, hegemoni dianggap sebagai dominasi yang tampak logis karena dibangun melalui kombinasi persetujuan sosial dan paksaan halus. Metode ini sejalan dengan ide-ide Gramsci (1971) tentang dua pilar utama hegemoni yaitu persetujuan dan kekerasan.

Kehadiran Freeport-McMoRan di Indonesia sejak 1967 menunjukkan bagaimana kekuasaan hegemonik bekerja melalui koneksi kepentingan antara AS dan elit politik Indonesia. Kemitraan yang muncul sejak Orde Baru terkait dengan kepentingan geopolitik Amerika untuk mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara setelah tahun 1965. Robinson (2018) menguraikan bagaimana strategi politik dan ekonomi Amerika untuk mendukung pemerintah Indonesia pada masa itu untuk menghentikan pengaruh kiri yang semakin meningkat. Dalam kondisi seperti ini, rezim baru membutuhkan dukungan dari negara-negara di seluruh dunia, sementara Amerika Serikat membutuhkan mitra yang kuat. Hubungan ini menentukan masuknya Freeport.

Karena ketergantungan Indonesia pada modal, teknologi pertambangan, dan jaringan perusahaan multinasional, dominasi ekonomi Amerika semakin kuat. Indonesia memiliki posisi tawar yang buruk dalam renegotiasi dan kontrak karya karena ketergantungan ini (Winters, 1996). Dalam situasi seperti ini, Indonesia berperan sebagai penyedia bahan mentah karena struktur ekonomi global, sementara perusahaan pusat di Amerika Serikat memperoleh nilai tambah dan keuntungan besar. Narasi pembangunan dan modernisasi memainkan peran penting dalam membangun legitimasi dari perspektif ideologi. Pemerintah dan media utama mendorong wacana “investasi asing sebagai motor pembangunan” untuk menunjukkan bahwa Freeport merupakan bagian penting dari kemajuan Papua. Masyarakat lokal terus menghadapi kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial, yang ditutupi oleh cerita ini (Martinez-Alier, J, 2001). Fenomena ini sejalan dengan pendapat Prebisch (1950) bahwa negara berkembang terlalu bergantung pada struktur ekonomi global yang tidak stabil.

4.2 Hegemoni Amerika Serikat dalam Praktik Pertambangan Freeport-McMoRan di Papua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Freeport menunjukkan jenis hegemoni kontemporer yang berlapis. Tiga dimensi utama hegemoni ini: ideologi, ekonomi, dan politik. Sehingga dominasi Amerika Serikat dapat bertahan lama, dimensi ketiga saling menguat. *Pertama*, dalam hal politik, hegemoni ditunjukkan oleh komitmen diplomatik dan hubungan bilateral yang memastikan operasi Freeport tetap berjalan. Kontrak karya tahun 1967 ditandatangani pada saat pemerintah Indonesia membutuhkan stabilitas ekonomi dan pengakuan internasional. Menurut Winters (1996), selama Orde Baru, modal asing digunakan sebagai alat politik untuk menciptakan stabilitas dan Amerika Serikat menggunakan investasi sebagai bagian dari strategi geopolitik regional. Keberadaan Freeport

juga dilegitimasi oleh elit politik dan birokrasi Indonesia. Dukung Freeport tersebar lintas pemerintahan karena kebijakan investasi asing, retorika pembangunan, dan kepentingan fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa pola ini menghasilkan aliansi antara kekuatan nasional dan internasional, yang menghasilkan apa yang disebut Gramsci sebagai blok historis—koalisi yang menopang struktur dominasi.

Kedua, dalam hal ekonomi, Freeport menghasilkan keuntungan besar setiap tahun karena memiliki aset tambang yang memiliki nilai strategis. Struktur nilai tambah masih didominasi oleh korporasi induk di Amerika Serikat, meskipun kontribusi penerimaan negara meningkat, terutama setelah peralihan saham ke Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Zada et al (2021) telah menganalisis renegotiasi dan akuisisi 51% pemerintah sebagai langkah kedaulatan dalam bentuk lisensi (Zada et al, 2021). Meskipun demikian Freeport mencatatkan kinerja keuangan gemilang selama tahun 2021. Pendapatan perusahaan mencapai USD 7,5 miliar atau sekitar Rp 109 triliun (Fajriadi, 2025). Tetapi yang diterima oleh negara cuman Rp 40 triliun, dan ini naik dari tahun 2020 sebesar Rp 10 triliun (Umah, 2021). Oleh sebab itu, pendapatan negara dari Freeport sebagian besar keuntungan bersih masih mengalir ke negara lain. Posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tetap terbatas karena ketergantungannya pada modal, teknologi tambang, dan jaringan industri global. Temuan penelitian mendukung teori ketergantungan tentang hubungan pusat-pinggiran dari Prebisch, Cardoso, dan Faletto. Sementara negara maju menguasai nilai tambah, Indonesia berfungsi sebagai penyedia bahan mentah.

Ketiga, dimensi ideologis. Pada tingkat ideologis, Freeport membangun legitimasi melalui inisiatif CSR, pemberdayaan masyarakat, dan pencitraan media bahwa ia membantu pembangunan Papua. Menurut WALHI (2018), cerita ini berfungsi untuk menutupi efek buruk tambang, termasuk kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan marginalisasi masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisah pembangunan ini berhasil mendorong persetujuan, yang memungkinkan keberadaan perusahaan diakui sebagai bagian dari pembangunan nasional. Menurut Gramsci, ini menunjukkan bahwa hegemoni ideologis berhasil karena ketimpangan dianggap normal.

4.3 Kontra Hegemoni di Papua dan Dampaknya

Sebagai tanggapan terhadap dominasi politik, ekonomi, dan ideologis yang dibangun oleh Freeport dan aktor pendukungnya, kontra-hegemoni muncul di Papua. Penelitian menunjukkan bahwa perlawanan berasal dari masyarakat adat, LSM, akademisi, dan media independen yang mengangkat masalah ketidakadilan dan dampak lingkungan. Perlawanan masyarakat adat karena tanah adalah sumber identitas dan kehidupan masyarakat Amungme dan Kamoro, mereka menolak eksploitasi tanah adat dan kerusakan lingkungan. Studi Kusumaryati (2020) menunjukkan bahwa komunitas adat Papua melihat tanah sebagai bagian dari iman dan struktur sosial, sehingga eksploitasi tambang memiliki dampak kultural dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran konvensional ini adalah jenis kesadaran tandingan atau kesadaran tandingan yang menentang nilai-nilai kapitalis yang dibawa oleh perusahaan.

Sementara, LSM dan media alternatif cenderung penyumbang penting dalam kontra hegemoni. Hal tersebut dikarenakan dampak konflik sosial, pelanggaran HAM, dan lingkungan di Papua diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti WALHI, JATAM, Amnesty International, dan Human Rights Watch (WALHI, 2018; Amnesty, 2021). Data dan cerita tandingan dijadikan wacana pembangunan versi perusahaan dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan ini mendorong kritik nasional terhadap ketimpangan dan pengelolaan tambang. Melalui produksi wacana kritis mengunci kontra hegemoni. Wawancara kritis tentang ketidakadilan struktural dan keterlibatan militer dalam pengamanan tambang diadakan oleh media independen seperti akademisi dari berbagai universitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi wacana ini merupakan jenis pertempuran posisi, atau perselisihan ideologis, dalam masyarakat sipil.

Kontra hegemoni cenderung menekan perubahan kebijakan pemerintah Indonesia tentang pengelolaan tambang dipengaruhi oleh konflik hegemonik yang muncul di Papua. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil dan tuntutan keadilan memengaruhi kebijakan negara.

Pertama, nasionalisasi saham Freeport. Pemerintah Indonesia secara simbolis mengambil alih 51% saham Freeport pada 2018 melalui MIND ID, menunjukkan upayanya untuk meningkatkan kedaulatan sumber daya alam. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan belum sepenuhnya hilang karena pihak asing masih menguasai manajemen dan teknologi.

Kedua, hilirisasi dan industrialisasi nasional. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah nasional, kebijakan hilirisasi yang diluncurkan pemerintah sejak 2020 menunjukkan tujuan baru dalam politik ekonomi (ESDM, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah upaya negara untuk membangun hegemoni baru yang berpusat pada kemandirian nasional. *Ketiga*, penguatan regulasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah didorong oleh tuntutan masyarakat adat dan LSM untuk meningkatkan tata kelola lingkungan, transparansi kontrak, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran ini merupakan bagian dari proses pergeseran hegemoni menuju struktur yang lebih fleksibel dan terbuka.

5. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa hegemoni Amerika Serikat dalam industri pertambangan Indonesia khususnya dengan operasi Freeport-McMoRan di Papua dibangun melalui kombinasi kekuatan ekonomi dan faktor politik, struktur ketergantungan, dan legitimasi ideologis. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pengelolaan sumber daya alam adalah contoh hegemoni modern yang memanfaatkan kesepakatan sosial dan dominasi. Struktur kekuasaan ini memungkinkan penguasaan aset strategis untuk jangka waktu yang lama. Struktur ini juga menciptakan lingkungan di mana ketimpangan dalam proses pembangunan bangsa dianggap wajar. Dalam konteks domestik, keberadaan Freeport menunjukkan bagaimana pihak-pihak internasional dapat memengaruhi kebijakan nasional melalui peran elit politik, kebijakan investasi, dan pengembangan wacana pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun nasionalisasi saham menghasilkan keuntungan fiskal dan simbolis, kedaulatan penuh negara dalam pengelolaan tambang tetap dibatasi oleh ketergantungan modal dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa hegemoni tidak hanya terkait dengan kepemilikan; itu juga terkait dengan penguasaan pengetahuan, kekuatan teknologi, dan organisasi pasar global.

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menantang sistem kekuasaan yang timpang, seperti yang ditunjukkan oleh kontra-hegemoni yang muncul dari masyarakat adat, LSM, akademisi, dan media alternatif. Penelitian menunjukkan bahwa kritik terhadap ketidakadilan sosial, konflik lahan, dan kerusakan lingkungan mendorong perubahan kebijakan negara, seperti memperkuat regulasi, hilirisasi, dan meningkatkan transparansi tata kelola tambang. Upaya ini menunjukkan pergeseran menuju fokus politik ekonomi pada keadilan lingkungan dan kedaulatan nasional. Penelitian ini juga membantu studi politik internasional, terutama dalam memahami bagaimana hegemoni global berfungsi di negara berkembang. Dalam penelitian ini, pendekatan Gramscian dapat berfungsi sebagai kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis hubungan antara negara kuat dan negara lemah dalam hal sumber daya alam.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang berfokus pada tiga aspek. *Pertama*, kajian mendalam mengenai dinamika pasca-nasionalisasi saham dan implikasinya terhadap struktur kekuasaan ekonomi. *Kedua*, penelitian mengenai efektivitas hilirisasi dalam mengurangi ketergantungan pada modal asing. *Ketiga*, analisis mengenai peran masyarakat adat dalam membangun model tata kelola tambang yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian lebih lanjut perlu memperluas fokus pada dampak sosial jangka panjang di Papua agar kebijakan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Akhirnya, penulis berharap bahwa penelitian ini akan membantu meningkatkan kesadaran kritis tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan sosial, kedaulatan nasional, dan keberlanjutan lingkungan. Harapan dari temuan penelitian ini akan menjadi dasar untuk studi selanjutnya dan menjadi pijakan untuk mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*. ISEAS Publishing.
- Astuti, A. A. (2023). Analysis of Indonesian Economic Development: Case Study Mining Business in Papua Province. *International Journal of Public Administration: Management and Economic Development*, 8(1). <https://doi.org/10.60026/ijpamed.v8i1.81>.
- Astuti, A. D., & Putranti, I. R. (2018). Implikasi kebijakan Indonesia dalam menangani kasus pencemaran lingkungan oleh PT Freeport terhadap keamanan manusia di Mimika Papua. *Journal of International Relations*.
- Bocock, R. (2007). *Hegemony*. Amerika: Routledge.
- Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). *Dependency and development in Latin America*. University of California Press.
- Cox, R. W. (1983). Gramsci, hegemony, and international relations: An essay in method. *Millennium: Journal of International Studies*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fajriadi, Alif Ilham. 1 Oktober 2025. Induk Freeport Lepas Saham 12 Persen untuk Indonesia. Tempo.co, diakses pada 11 November 2025 dari link [<https://www.tempo.co/ekonomi/induk-freeport-lepas-saham-12-persen-untuk-indonesia-2075288>].
- Fakih, M. (1996). *Analisis sosial kritis*. Yogyakarta: Insist Press.
- Femia, J. (1981). *Gramsci's political thought: Hegemony, consciousness and the revolutionary process*. Oxford University Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the prison notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds.). International Publishers.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Hasan, P. A. R. (2010). Development, power and the mining industry in Papua: A study of Freeport Indonesia. *Journal of Business Ethics*
- Human Rights Watch. (2020). *Indonesia: Events of 2020*. Human Rights Watch.
- Kusumaryati, V. (2020). *Ethnography of bureaucracy: Papua and the governance of colonial present*. Cornell University Press.
- Leith, D. (2002). *The politics of power: Freeport in Suharto's Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- N. Rosidin, A. (2025). Kapitalisme dan ketimpangan sosial di era globalisasi: Studi kasus PT Freeport Indonesia di Papua. *NAGARA: Jurnal Ilmu Administrasi Pemerintahan dan Politik*.
- Nugroho, A. B. H., & Hiariej, E. (2013). Kekuatan Modal dan Perilaku Kekerasan Negara pada Masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru: Studi kasus Freeport. *Jurnal Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. II, No. 1, edisi Juni.
- Martinez-Alier, J. (2001). Environmental Conflicts, Environmental Justice, and Valuation. *Journal of Hazardous Materials*, Volume 86, Edisi 1–3, 14 September.
- Patria, N., & Arief, A. (2009). *Antonio Gramsci: Negara dan hegemoni*. Pustaka Pelajar.
- Prebisch, R. (1950). The economic development of Latin America and its principal problems. *United Nations Economic Commission for Latin America*.
- Redi, A. (2022). Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945. *Jurnal Konstitusi*.
- Robinson, G. (2018). *The killing season: A history of the Indonesian massacres, 1965–66*. Princeton University Press.
- Smith, Adam., & Marx. (2000). Politik dan kekuasaan ekonomi.
- Umah, Anisatul. 12 Oktober 2021. Erick Thohir: Laba Freeport Tahun Ini Naik 300% Jadi Rp 40 T. CNBC Indonesia, diakses pada 11 November dari link

[<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211012120425-4-283243/erick-thohir-laba-freeport-tahun-ini-naik-300-jadi-rp-40-t>].

WALHI. (2018). *Laporan dampak ekologis dan sosial pertambangan Freeport di Papua*. WALHI.

Winters, J. A. (1996). *Power in motion: Capital mobility and the Indonesian state*. Cornell University Press.

Zalik, A. (2015). Resource extraction and resistance: Mapping the global local. *Journal of Peasant Studies*

Zada, K., et al. 2021. Law and Sovereignty of the State in the Renegotiation of Freeport Contracts in Papua. *Jurnal Cita Hukum*, <https://doi.org/10.15408/JCH.V9I2.21546>.